



PENDIDIKAN PLURALISME DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA (Perspektif Agama Hindu)

I Gede Dedy Diana Putra ¹⁾, Kadek Agus Wardana ^{2*)}, I Made Gede Nesa Saputra ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Denpasar, Indonesia
^{*)} e-mail korespondensi: agoes.wardana89@gmail.com

Article Submitted: 14th July 2023; Accepted 14th August 2023; Published: 1st September 2023

Abstract

A country that has multiethnic and multimental uniqueness like Indonesia is faced with its own dilemma, on the one hand bringing Indonesia to become a great nation as a multicultural nation-state, but on the other hand it is a threat. So it is not an exaggeration to say that multicultural conditions are like coals in husks which are easily ignited and heat up at any time. Indonesia has great potential for conflicts between groups, ethnic groups, religions and ethnic groups. One of the indications is that various social, professional, religious, and organizations or groups have started to thrive and are struggling and acting on behalf of group interests which lead to SARA (ethnic, religious, racial and inter-group) conflicts. To produce valid and reliable data, this paper uses a qualitative writing style. In producing logical data, this paper performs several stages of data sorting in the form of: 1). Data reduction, 2). Display data, 3). Verifying data, and 4). Interpreting research data. In its presentation, measurable analysis becomes the basis for processing the data obtained. The perfection of this paper cannot be separated from the library technique which is carried out through an assessment of the existing literature on Google Scholar. Education is the spearhead that is able to restrain and eradicate all harmful doctrines of non-plural and non-multicultural actions which are very appropriate to be applied in the current era in preventing interests and combinations of intolerant understandings in the name of a religion. Strategies in school and implementing a curriculum that emphasizes pluralism and multiculturalism in the current era are very important to be followed up immediately so that misleading intellectual understanding does not multiply ingrained in students' understanding. The role of parents and teachers must be able and synergized in implementing an understanding of the concept of plurality and the plurality of a life so that later students or students understand differences and are able to re-install heterogeneity. Hinduism in the scope of analysis of pluralism education highly appreciates social diversity. The concept of Hinduism which incidentally is very plural and in its holy book contains teachings about realizing tolerance, namely Widya, Maitri, Ahimsa, and Santi.

Keywords: pluralism education, national identity, Hindu religious perspective



I. PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan yang melaksanakan sistem pengajaran dengan wujud lembaganya yang lebih dikenal dengan sekolah, sebenarnya sudah dimulai pada permulaan abad ke-16, yaitu dengan kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia, yang kemudian disusul oleh Bangsa Spanyol. Hilangnya kekuasaan Belanda diikuti tumbangannya sistem pendidikan yang didirikan oleh Belanda menyebabkan sekolah-sekolah dengan sistem pembedaan golongan ikut lenyap dan berganti dengan sistem yang merata tanpa memandang golongan (kasta). Sehingga dengan ini masyarakat golongan bawah bisa bersekolah. Hal ini dapat dilihat pada masa Belanda, yaitu rakyat yang dapat merasakan pendidikan formal hanya rakyat pribumi untuk kalangan atas, sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan. Sedangkan untuk mengenyam pendidikan, berbeda dengan pemerintahan Jepang yang mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan pada jaman itu. Hal ini memungkinkan rakyat golongan menengah kebawah berhak untuk mengenyam pendidikan formal yang dibuat oleh Jepang tanpa membedakan golongan kasta (Fadli dan Kumalasari, 2019).

Kesimpulan yang dapat diambil dari catatan diatas adalah begitu kerasnya gempuran-gempuran mempolitisasi dalam dunia pendidikan. Sejarah membuktikan bahwa banyak kepentingan individual dan kelompok untuk mencapai sesuatu dalam sejarah pendidikan. Didalam UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah.

Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan dan mengetahui jati diri peserta didik tersebut, ada yang lebih penting dalam metode pendidikan yang di era abad ke-21 ini yaitu harus mengedepankan sebuah pluralitas di kehidupan organisasi pendidikan karena, pergulatan intoleranisme sudah mulai menjalar dan mengakar dalam dunia pendidikan yang dapat merusak citra sebuah pendidikan tersebut. Pluralisme pendidikan sebagai salah satu alat dan pemahaman mengenai nilai-nilai toleransi terhadap keanekaragaman budaya, ideologi, sosial-politik, ekonomi, dan keagamaan, harus menjadi karakter pendidikan kita saat ini, sehingga perlunya pluralism pendidikan menjadi salah satu kurikulum, guna mencetak generasi yang jauh lebih baik dimasa yang akan datang. Masyarakat heterogenitas dalam pergaulan sekolah belum sepenuhnya ditanamkan bagi peserta didik baik berawal dari keluarga hingga keranah tenaga kependidikan. Heterogenitas adalah kondisi objektif yang dialami oleh seluruh individu manusia dalam seluruh organisasi masyarakat Indonesia tidak terkecuali disekolah. Heterogenitas adalah keragaman individu berdasarkan suku, adat atau ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat yang heterogenitasnya tinggi tidak jarang sering terjadi konflik, yang dapat menyebabkan hak-hak kodrati tiap manusia seperti tergusur dan tidak diindahkan. Ketika seorang individu merasa tidak diterima, tidak dihargai dan kemudian ia



merasa tergusur dan tidak diindahkan karena perbedaannya, individu tersebut sering melakukan kontradiksi yang dapat berpuncak pada konflik individu atau pun konflik kelompok. Beberapa contoh konflik yang sering terjadi, baik itu secara langsung dialami maupun disaksikan dimedia cetak maupun media elektronik antara lain konflik antara kaum pendatang dengan masyarakat asli, konflik agama di Ambon dan Poso, konflik sara di Sumatera, konflik suku di Kalimantan, dan masih banyak sejarah konflik sosial yang saling mendiskreditkan atau bahkan saling membunuh lantaran terdapat perbedaan Haba (2012); Jati (2013); Zakiyah (2017).

Dasar dari pluralisme pendidikan itu sendiri, tidak lain adalah dalam rangka membentuk peserta didik menjadi manusia yang memanusiakan. Konsep dasarnya adalah humanisme, yakni adanya penghargaan yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat secara inheren dalam diri manusia. Penghargaan tersebut tercermin dalam tingkah laku manusia yang menghargai kehidupan orang lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya. Pendidikan pluralisme secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendidikan pluralisme didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Pembenahan sistem pendidikan nasional kita untuk menjawab tantangan era globalisasi yang nantinya akan mengarah pada perdagangan bebas dan ideologi yang berbeda, maka pendidikan harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk mampu mengarungi kehidupan yang akan datang. Dalam penyelenggaraan pendidikan, hendaknya melihat atau berorientasi ke depan, memikirkan apa yang akan dihadapi oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Maka dalam merancang perubahan pendidikan atau mengembangkan teknologi, tidaklah tepat apabila kita hanya memikirkan kebutuhan generasi sekarang saja, tetapi kita harus mengingat dan melihat serta memikirkan generasi yang akan datang, dan hal itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat melakukan reformasi dalam dunia pendidikan. Selama ribuan tahun hingga era modern ini, masyarakat dan peradaban manusia yang beragam telah mengembangkan ilmu dan teknologi berdasarkan landasan spiritual dan moral. Terdapat kesatuan antara agama, ilmu dan teknologi, yang merupakan refleksi dari pandangannya yang holistic dan terpadu terhadap realitas kosmis dan kehidupan sebagai sebuah pencarian jati diri manusia. Komponen nilai-nilai budaya merupakan aktualisasi yang melekat erat pada identitas nasional khususnya Indonesia dengan ragam budaya yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang tersebar di seluruh tanah air. Bentuk penguatan jati diri bangsa dan identitas nasional diperkuat di dalam penyelenggaraan aktivitas kebudayaan, memunculkan gerakan untuk mencintai budaya sendiri dan mengaplikasikannya lewat pendidikan di bangku sekolah.

II. METODE

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analitis yang terstruktur dan komprehensif. Selanjutnya dalam menganalisa data penelitian, penulis melakukan serangkaian tahapan agar hasil penelitian bersifat logis, objektif dan empiris. Rangkaian tahapan yang dimaksud adalah mereduksi data, mendisplay data, memverifikasi data, dan menginterpretasi data penelitian. Metode lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan memasukan kata kunci pada google scholar serta berbagai



literature lainnya yang menunjang referensi jurnal ini. Selain itu, validitas data penelitian ini tidak lepas dari kontribusi beberapa jurnal dan buku-buku terkait, yang menunjang penyelesaian jurnal ini.

III. PEMBAHASAN

A. Indonesia Merupakan Negara Majemuk

Indonesia adalah suatu negara multicultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Selo Soemardjan (Alfian, 1991: 173) mengemukakan bahwa pada waktu diaspkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa ditengah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Menurut Bhiku Parekh (dalam Azra 2006: 62) mengatakan bahwa Masyarakat multicultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Multikulturalisme dan pluralisme tidak hanya diterapkan dalam ranah agama dan kebudayaan saja, akan tetapi penerapan pluralisme dan multikulturalisme perlu menjadi sebuah kurikulum baru yang akan dienyam dibangku sekolah agar dari beberapa kalangan orang yang berbeda dari sekian peserta didik dapat saling menerima satu sama lainnya.

Menurut sejarahnya, di negara-negara yang menganut konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada, Pendidikan Pluralisme bukanlah barang baru lagi. Karena mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam yang bertujuan memajukan dan memelihara integrasi nasional. Sedangkan di Indonesia, pendidikan pluralism relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Memang terdapat sejumlah kekuatan di dunia ini yang ikut melahirkan Pendidikan Pluralisme-Multikulturalisme. Yang menurut H.A.R Tilaar (dalam Ma'arif, 2008) kekuatan-kekuatan tersebut adalah:

- a. Proses demokratisasi dalam masyarakat dunia, yang dipicu oleh pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak membedakan atas warna kulit, agama, dan gender.
- b. Pembangunan kembali Eropa sesudah Perang Dunia II (marshal plan), yang telah menarik pekerja-pekerja di luar Eropa memasuki negara-negara Eropa Barat. Akhirnya banyak yang menetap dan menjadi warga setempat sehingga mereka meminta perlakuan adil, terutama pendidikan bagi generasi mudanya agar bias mengakomodir kultur asal mereka.
- c. Lahirnya paham nasionalisme kultur, sejalan dengan berkembangnya paham demokrasi dan HAM. Sehingga pendidikan pun mulai terbuka untuk memenuhi kebutuhan serta mempersiapkan paradigma baru bagi kelompok-kelompok etnis baru dengan kebudayaan mainstream-nya.

Upaya mengikis keberagaman yang eksklusif di masyarakat merupakan tuntutan yang mendesak. Dalam konteks masyarakat yang plural, diperlukan pemikiran dan sikap inklusif yang berpandangan bahwa diluar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. Pandangan seperti ini perlu ditumbuhkan



dalam masyarakat. Jika ditinjau dari kebenaran ajaran masing-masing, pandangan inklusivisme tidaklah bertentangan karena seseorang masih tetap meyakini bahwa agamanyalah yang paling baik dan benar, dan pada saat yang sama ia memiliki sikap toleran dan persahabatan dengan pemeluk agama lain. Konflik agama dalam suatu masyarakat majemuk, adalah suatu yang sangat wajar terjadi. Ini dikarenakan setiap agama mempunyai ciri-ciri tersendiri, yang tidak memiliki kesamaan karakteristik. Agama betapapun mengajarkan tentang solidaritas dan integritas sosial tetapi mempunyai kecenderungan terjadinya disintegrasi. Sebab untuk memperkuat sejauh mana kebenaran suatu agama itu, doktrin yang dianut dan dipahami dijadikan acuan dan pegangan dalam menghadapi lingkungannya, di mana ia hidup dan berkembang. Jadi betapapun agama dapat menjadi unsur perekat tetapi pada sisi lain ia memicu timbulnya konflik (disintegrasi). Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memang bukan semata-mata karena faktor perbedaan agama. Namun harus diakui bahwa agama seringkali digunakan oleh kelompok yang bertikai sebagai legitimasi bagi tindakannya atau digunakan sebagai pijakan dalam membangun solidaritas kelompoknya dalam berhadapan dengan kelompok lain.

Konflik antar umat beragama dalam skala kecil maupun skala besar sedemikian parah. Kerapkali ditulis bahwa salah satu faktor penyebab konflik di Indonesia yang paling menonjol adalah karena faktor agama. Dalam konteks mekanisme agama sebagai *system of reference values* ini, pada sisi lain, agama juga tampil sebagai perekat integrasi masyarakat, terutama pada tipologi masyarakat yang agama dan pemahamannya homogen. Agama yang dipakai secara kategoris memang potensial mengundang konflik, bahkan disintegrasi, baik sesama internal pemeluk agama maupun pemeluk antar agama, maka dari itu implementasi dari pedoman Pancasila menjadi acuan dalam masyarakat dan pendidikan dibangku sekolah dalam membangun sebuah pluralisme dengan tidak membedakan sebuah ideologi.

Penguatan implementasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan kehidupan gotong-royong menjadi perekat kehidupan masyarakat Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Penguatan identitas nasional di dalam masyarakat yang pluralistik pada bangsa Indonesia menjadi sangat penting agar tumbuh rasa solidaritas dan sinergis bersama di dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Indonesia telah berhasil di dalam menentukan dan membentuk identitas nasional setelah melalui proses Panjang baik pada masa kerajaan, masa sebelum kemerdekaan, dan masuk kepada era setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kehidupan bernegara dimulai, maka kesepakatan dan tujuan bersama dibentuk untuk mendukung identitas nasional (Winarno, 2020).

B. Pluralisme Merupakan Pendidikan Dalam Membangun Jati Diri Bangsa

Pendidikan Pluralisme sering dikenal orang dengan sebutan “Pendidikan Multikultural”. Dawam, 2003 menjelaskan definisi pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Muhammad Ali menyebut pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralis secara agama sekaligus berwawasan multikultural, seperti itu, dengan sebutan “Pendidikan Pluralis Multikultural”. Menurutnya, pendidikan semacam itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya komprehensif mencegah dan



menanggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa, sedangkan nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi. Memperhatikan beberapa definisi tentang pendidikan pluralisme tersebut di atas, secara sederhana pendidikan pluralisme dapatlah didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (Ma'arif, 2008). Pendidikan di sini, dituntut untuk dapat merespon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan yang berbasis pluralisme akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan kesadaran terhadap para peserta didiknya akan pentingnya saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain. Berbagai macam pluralisme yang ada pastinya memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat serta bagi pendidikan, terutama bagi lingkungan sekolah yang menyangkut peserta didik yang memuat budaya dan tradisi sekolah. Berikut ini, manfaat adanya pluralisme:

a. Kemandirian

Permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait agar mampu mencari solusi menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia bisa berkembang dengan pesat, apabila tenaga pendidik mendapat kebebasan mengolah pembelajaran serta pemerataan pembelajaran tentang multikultur dan pluralis yang menyeluruh di Indonesia. Hal ini selaras dengan pendapat Jumali (dalam Nurkholis, 2013: 26) bahwa peran dan fungsi tenaga pendidik ialah membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya serta berperan memberikan pengetahuan dan penanaman nilai-nilai moral dan menghargai perbedaan. Selaras dengan pendapat tersebut, Sadirman (dalam Idzhar, 2016: 223) menjelaskan bahwa guru berperan sebagai sarana pengembangan pribadi peserta didik. Sedangkan menurut Curts dan Wilma (dalam Zein, 2016: 279) bahwa guru memiliki peran sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Para pendidik dan peserta didik harus mempunyai kemandirian masing-masing dalam membuat inovasi belajar untuk mendapatkan pola baru yang menyenangkan di bangku sekolah.

Kemandirian adalah suatu hal atau kondisi seseorang yang bisa berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Maksudnya, kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri dengan ditandainya sikap inisiatif. Adanya pluralisme bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan kemandirian. Setiap orang bisa berdiri sendiri tanpa ada perasaan tertekan, terkontrol dan diawasi oleh orang dari kelompok lainnya dengan latar belakang kultur yang berbeda. Karena, setiap orang memiliki hak untuk hidup dan maju. Bahkan, setiap orang juga berhak mengembalikan tradisi atau kultur yang sudah alam menjadi panutannya dalam kehidupan bersosial, sehingga kondisi ini menimbulkan stimulasi dalam kemandirian. Kemandirian dapat diterapkan dalam banyak hal, salah satunya adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu sikap yang penting dimiliki oleh siswa. Kemandirian belajar menurut (Boekaerts, Zeidner, & Pintrich, 1999), adalah proses yang aktif dan konstruktif dimana peserta didik menetapkan tujuan untuk pembelajaran mereka dan kemudian mencoba memantau, mengatur, dan mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku mereka, dipandu dan dibatasi oleh tujuan dan fitur kontekstual mereka di lingkungan.



Sedangkan menurut (Tahar & Enceng, 2006), kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang dilakukan oleh seseorang dengan kebebasannya dalam menentukan dan mengelola sendiri bahan ajar, waktu, tempat, dan memanfaatkan sumber belajar yang diperlukan. Sehingga dapat dikatakan, seseorang yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi mampu mengelola kegiatan belajarnya sendiri dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

b. Kebebasan

Siasat adaptif juga dapat dilakukan dengan cara belajar dari orang lain. Mengingat bahwa belajar bias dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Jika dilihat dari kacamata dalam teori pendidikan, yang dimaksud dengan sumber belajar itu sangatlah luas, siswa tidaklah terbatas hanya pada guru dalam arti pengajar formal di sekolah saja. Namun dapat belajar dari buku dan dari orang lain. Begitu juga guru bisa belajar dari orang lain yaitu dengan memperhatikan pengalaman yang dialami orang lain, kemudian dari pengalaman tersebut dapat dicontoh dan diikuti keberhasilannya, dari situlah baru kemudian bias menambahkan dan mengembangkannya. Mana yang baik ditiru, begitu juga sebaliknya yang buruk dihilangkan. Nilai kebebasan, sekolah memberikan kebebasan diberikan kepada siswa tetapi ada batasannya. Seperti halnya semua siswa diberikan kebebasan yang sama untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, karena memang siswa yang berasal dari berbagai latar belakang agama yang beragam yaitu terdapat siswa yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Nilai keadilan, bahwa sekolah bersikap adil tidak berat sebelah, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, seperti dalam halnya sekolah mau menerima siswa dari berbagai latarbelakang yang berbeda, semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk bias bersekolah tanpa melihat latarbelakang ekonomi, budaya, hingga tingkat sosialnya, dapat dilihat dari segi keuangan.

c. Menumbuhkan Sifat Saling Menghargai

Pendidikan Budi Pekerti tidak hanya ditanamkan kepada siswa namun dalam setiap pribadi siswa juga diajarkan mengenai perilaku-perilaku untuk meningkatkan budi pekerti yang baik. Dengan sistem yang sama anak-anak dibuka pikiran dan mata hatinya agar bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini. Adanya majalah dinding (mading) sekolah yang bertujuan baik yaitu untuk mengajak siswa untuk mau berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma yang ada. Seperti misalnya isi dari salah satu mading yang terpampang pada dinding sekolah “kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan”; “isilah waktu luangmu dengan berbuat kebajikan”. Adanya majalah dinding di sekolah juga bertujuan untuk memotivasi siswa agar siswa mampu mengatur dan menyeimbangkan antara pikiran, energi, waktu, tempat, benda, dan sumber daya yang lainnya dengan baik, harapannya dengan adanya mading, pihak sekolah dapat mengarahkan semua siswa guna mencapai tujuan yang selama ini dicita-citakan. Nilai saling menghormati dan menghargai antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan orang tua dan wali murid. Nilai saling menghormati dan menghargai tersebut di anggap baik dan pantas untuk dilakukan serta sudah menjadi kebiasaan yang bertujuan untuk menanamkan dalam diri siswa sikap positif untuk dapat saling menghormati, menghargai dan bertoleransi dalam menyikapi adanya keragaman budaya, suku, agama, bahasa, adat istiadat, etnis dan sebagainya yang berbeda-beda dan bermacam-macam sehingga harapannya dapat menciptakan suatu kerukunan. Nilai kasih sayang, dimiliki oleh semua siswa dan juga seluruh



warga sekolah. Menciptakan suatu perdamaian dan kerukunan atas adanya keberagaman agama, etnis, budaya, ras, suku, kelas sosio-ekonomi dan sebagainya perlu adanya sikap yang harus ditanamkan kepada diri siswa yaitu sikap saling menghormati, menghargai, kasih sayang, dan penuh pengertian terhadap adanya perbedaan. Semua siswa dipantau, diawasi, diperhatikan, dan diberi kasih sayang yang sama oleh guru tanpa melihat latar belakang siswa yang beragam. Nilai persaudaraan dan kepedulian sosial juga harus diterapkan dalam bangku sekolah guna mencapai apa yang ditetapkan dalam pancasila yaitu sila ke-dua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

d. Toleransi

Nilai-nilai toleransi yang dimiliki oleh seorang guru merupakan peranan yang signifikan dalam membentuk sikap dan tingkah laku peserta didik termasuk diantaranya nilai-nilai toleransi. Upaya untuk menghindari konflik agar tidak terulang kembali, dapat dilakukan dengan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi yang dapat lebih digali melalui jalur pendidikan. Guru memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk sikap dan tingkah laku peserta didik termasuk diantaranya nilai-nilai toleransi.

Metode tersebut adalah sebuah keharusan untuk diterapkan oleh pendidik dalam pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang berbeda secara kultural mengarahkan atau mendorong peserta didik memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain. Pentingnya nilai-nilai toleransi bagi peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang toleran terhadap segala bentuk perbedaan. Kebersamaan itu dapat dicermati pula pada saat berlangsungnya pembelajaran dalam diskusi kelompok misalnya, mereka saling menghargai pendapat teman yang berbeda pandangan. Selain itu dalam melaksanakan tugas kelompok mereka mampu berkolaborasi secara baik dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, tidak ada yang membuat kegaduhan dengan maksud untuk merusak ketentraman ibadah pemeluknya seperti pada perayaan hari besar keagamaan. Toleransi sehari-hari yang dilakukan peserta didik baik di sekolah dan luar lingkungan sekolah dapat di contohkan pada saat adanya rapat di sekolah, yang mana diadakan dengan mengundang orangtua peserta didik ke sekolah saat adanya rapat tentang kenaikan kelas, ujian, maupun tentang kegiatan di sekolah. Selain itu juga pada kegiatan keagamaan yang mana warga juga turut berpartisipasi baik dalam kemanan lingkungan sekitar, serta saling memperhatikan dengan memberikan kenyamanan pada sikap dan kondisi saat adanya kegiatan keagamaan. Menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan, salah satunya suka menolong tetangga beda keyakinan dapat dicontohkan bukan hanya di sekolah dengan mengumpulkan yuran untuk acara kegiatan keagamaan, namun juga pada bantuan yang mana sebagai manusia saling tolong menolong tanpa harus membedakan derajat dan keyakinan masing-masing, sehingga pada kegiatan tersebut terjadilah sebuah gorong royong serta saling membantu jikalau ada kesusahan.

Nilai persaudaraan dan kepedulian sosial, ditanamkan kepada semua siswa agar tercipta kehidupan yang dinamis, harmonis dan bermakna maka perlu adanya penanaman nilai bahwa semua adalah saudara tanpa melihat perbedaan. Terdapat nilai kepedulian sosial dimana semua siswa mau peduli terhadap orang lain yang kurang membutuhkan, saling berbagi, karena memang pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri pasti membutuhkan orang lain. Proses yang dilakukan dalam menerapkan nilai-nilai pluralisme mencakup strategi yang digunakan oleh pihak sekolah.



Peserta didik saat ini dianggap sebagai generasi milenial yang mampu menguasai teknologi, hal ini menuntut guru agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, pada kenyataannya guru masih terbebani oleh sistem administrasi sekolah daripada terfokus mendidik serta membentuk karakter peserta didik. Dalam dunia pendidikan, kecerdasan intelektual siswa haruslah seimbang dengan kecerdasan kognitif dan psikomotorik Suyitno (2012). Hal ini dikarenakan banyak siswa memiliki kecerdasan intelektual dan psikomotor yang baik tetapi tidak berkarakter. Banyak ahli pendidikan juga menilai bahwa pendidikan multikultural, pluralisme, dan heterogenitas di bangku pendidikan sangatlah dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan unsur kognitif individu melalui pendidikan formal, maupun pendidikan informal agar dapat membentuk afeksi didalam berpikir, berperilaku, dan bertindak individual untuk berani menerima perbedaan guna dapat mengatasi perbedaan menjadi satu kesatuan kesamaan yang dapat *learning to live together*. Lembaga pendidikan dapat menjadi ruang ideal dalam membangun budaya pluralisme tersebut, baik bagi siswa, guru, maupun masyarakat Aslan (2019) . Mengingat perkembangan budaya demokrasi juga menuntut setiap orang untuk menerima pluralisme dalam berpolitik, seperti pengakuan terhadap hak-hak golongan oposisi, kebebasan pers, kebebasan dalam beraspirasi, dan lain sebagainya, maka perlu diterapkan mutu sebuah pendidikan yang berbasis plural dan multikultural.

Interpretasi siswa tentang pluralisme diwujudkan lewat pengamalan pluralisme. Pengamalan pluralisme di sekolah umumnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan positif dengan menjalankan berbagai program sekolah, seperti merayakan halal bihalal dan natal bersama, mengundang para pemuka agama, mengadakan tahlilan, ret-ret, karnaval kenegaraan, pameran kebudayaan, musyawarah bersama, turnamen olahraga, dan hari alumni. Dari kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pola pengamalan pluralisme di setiap sekolah memiliki mutu atau kualitas yang sangat baik. Pada proses mengamati aktivitas siswa guru selalu menggunakan teknik pengajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam kelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah kekeluargaan, individu, serta religius, sehingga memudahkan guru dalam melakukan penilaian, menggunakan teknik observasi dan penilaian antar teman. Kedua teknik penilaian yang digunakan dipilih karena hasilnya lebih objektif menggambarkan sikap karakter dan pluralisme siswa lewat lembar observasi yang diisi oleh siswa sendiri untuk melatih mereka bersikap jujur dan percaya pada diri sendiri. Sikap jujur dan percaya diri pada siswa berkembang dengan baik dapat mengubah teman sebangku maupun teman dalam ranah sosialnya untuk berubah dan mau menerima perbedaan baik secara fisik maupun materiil.

Pola pendidikan karakter pluralisme yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar dapat memberdayakan siswa untuk mampu mengimplementasikan pengalaman belajarnya. Proses pembelajaran siswa di sekolah dilakukan dengan interaksi lingkungan guna membangun pemahaman, pengetahuan pluralisme, dan kepercayaan diri siswa di masyarakat plural Ismail and Hidayatulloh (2014). Dari adanya pemahaman, pengetahuan pluralisme, dan kepercayaan diri siswa di masyarakat plural dapat melahirkan sikap nasionalisme yang merupakan landasan ideal dari setiap negara. Konsep nasionalisme di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Implementasi konsep nasionalisme yang berlandaskan Pancasila, akan membangkitkan semangat nasionalisme (Sawaludin, 2016).



C. Pluralisme Dalam Agama Hindu

Pluralisme identitas di ruang publik tidak tumbuh berkembang dengan mulus. Selalu saja ada gesekan antara satu identitas dengan identitas lainnya. Gesekan tersebut didorong oleh faktor kekuasaan. Kehendak berkuasa tak terelakkan pada diri manusia manakala ia tampil di ruang publik. Terlebih ia tampil mewakili identitas tertentu. Dia akan merasa paling berhak menentukan aturan main ketimbang identitas lainnya. Sehingga identitas tertentu bisa menghakimi atau meminggirkan identitas lainnya. Dari segi inilah dikenal istilah politik identitas (Husni, 2010). Berbeda dengan Hindu dalam menyikapi pluralitas itu sendiri. Pengakuan Hindu terhadap pluralitas kehidupan sebanding dengan penghargaannya terhadap pluralitas itu sendiri. Dalam konteks Weda, penyebutan tentang keragaman akan dengan mudah dijumpai. Agama Hindu menghargai toleransi dan rasa hormat pluralisme, DR. Harun Nasution, Mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan: Jika kita juga melihat agama Hindu, sejarah agama mengatakan tidak ada tanda-tanda intoleransi agama dalam agama Hindu. Bentrokan agama jarang terjadi bertemu dan pertobatan terjadi perdamaian dan tanpa menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Agama Hindu adalah filosofis dan karena itu dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Oleh karena itu agama ini toleran. Beberapa bahkan berpendapat bahwa toleransi terlalu besar untuk melakukannya untuk menerima agama magis (Harun. 1995: 274).

Sekelumit fakta ini menegaskan bahwa sikap Hindu dalam kehidupan plural telah teruji. Tak ada distorsi dan disposisi sikap dalam wacana teoritik dan praksisnya. Hindu memandang, beragama adalah *sadhana*, yaitu diwujudkan nilai-nilai kebenaran dan kemuliaan agama dalam tindakan. Kebajikan dan spiritualitas tertinggi dalam Hinduisme adalah sirnanya kebencian, kekerasan, menyakiti (*Ahimsa Paramo Dharma*), dan merekahnya kasih sayang dalam hati. *Loka-sangraham*, merupakan kewajiban setiap manusia Hindu untuk mewujudkan keselarasan dan harmoni dalam kehidupannya (pluralitas sosial). Terkait dengan toleransi Hindu, Sri Swami Siwananda pernah menyatakan : “tak ada agama yang demikian luwes dan toleran seperti Hinduisme. Hinduisme sangat keras dan tegas memandang yang bersifat mendasar; namun ia sangat luwes menyesuaikan kembali terhadap hal-hal luar yang tidak mendasar. Itulah sebabnya mengapa ia berhasil dalam kehidupan selama berabad-abad. Pondasi Hinduisme telah diletakkan pada batuan dasar dari kebenaran spiritual. Keseluruhan struktur dari kehidupan Hindu dibangun pada kebenaran abadi, penemuan dari para rsi Hindu. Itulah sebabnya mengapa struktur ini telah bertahan selama berabad-abad (Siwananda, 2003: 10). Konsep-konsep sastra yang secara terkhusus bernuansa Hindu yang perlu dimuat dalam kurikulum untuk dipacu dan dijawantahkan kedalam bahasa sederhana yang bisa dicerna baik dari kalangan manapun. Pendidikan merupakan tolak ukur dalam mengetahui dan mendalami pluralisme tersebut. Melalui media pendidikan misi dalam mempluralkan dari kemajemukan yang sesuai dengan Pancasila akan terwujud dan menekan dari ekstrimisme terhadap penganut agama. Kutipan menurut Bhikhu Parekh, yang dimaksud dengan pendidikan pluralisme adalah pendidikan dalam kebebasan, terbebas dari segala macam prasangka, bebas untuk mengeksplorasi serta belajar dari budaya dan perspektif lain di tengah masyarakat yang multikultural.

Pendidikan tentang kemajemukan/toleransi/pluralisme diperlukan upaya atau sikap konkrit untuk mewujudkan moralitas yang terintegritas dapat terwujud, seperti yang terdapat



dalam ajaran Agama Hindu antara lain: 1) *Widya*, yang dalam konteks pluralitas dan kerukunan beragama dimaknai sebagai pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penghayatan dalam melihat keragaman sebagai kenyataan dan bagian dari kehidupan; 2) *Maitri*, yang dimaknai sebagai cinta kasih yang tulus kepada makhluk (orang) lain. Dalam konteks ini, Maitri berarti sikap menghormati dan menghargai keyakinan dan pilihan iman orang lain; 3) *Ahimsa*, berarti sirnanya hasrat menyakiti atau membunuh terhadap makhluk (orang) lain. Dalam konteks kerukunan beragama, *Ahimsa* tiada lain adalah lenyapnya hasrat untuk melecehkan, menghina, dan menistakan keyaninan atau agama yang lain; dan 4) *Santi*, yang diartinya kedamaian. Sehingga Pluralisme dalam pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

IV. SIMPULAN

Sejak Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai negara yang mengakui dan sekaligus menghargai kemajemukannya itu. Semboyan Negara Republik Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika atau Berbeda tapi Satu, merupakan suatu pengakuan bangsa Indonesia atas jati dirinya yang majemuk dan beranekaragam yang menjadi satu di negara ini. Upaya yang diharapkan dapat menghasilkan generasi umat dan bangsa yang sungguh-sungguh mencintai agamanya tetapi sekaligus menghargai kepercayaan orang lain. Membangun pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, sekaligus menjadi warga negara dan umat beragama yang toleran. Pemahaman yang baik dan benar tentang pendidikan pluralisme yang didalamnya berisikan pengajaran mengenai saling menghargai, menerima dan mengasihi seorang dengan yang lain, walaupun berbeda suku, bahasa, adat istiadat dan juga agama. Sasaran yang diharapkan untuk memperjuangkan adalah generasi muda dalam hal ini sejak usia anak-anak. Mereka harus benar-benar dididik, dibina dan dibentuk agar mereka mempunyai jiwa dan spiritual yang membangun bukan menghancurkan. Mempunyai jiwa saling menghargai antar sesama manusia tanpa batasan-batasan tertentu. Dalam Hindu pendidikan pluralisme sudah terwujud dalam teks-teks sastra yang bernuansa Hindu seperti bhagawadgita, nitisatra, sarasamuscaya, manawadharmasastra, dan lain sebagainya. Pendidikan era pluralitas masa kini jika tidak dibarengi dengan karakter akan menjadi ekstrim individualisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiq Dawam, 2003. Emoh Sekolah; Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press,), hlm. 100
- Aslan, S. 2019. *How is Multicultural Education Perceived in Elemantary Schools in Turkey?* Case Study. *European Journal of Educational Research* 8, 233–247.
- Bikhu Parekh, “Rethinking Multiculturalism” *Cultural Diversity and Political Theory* .<http://www.educationworld.com>. Diakses tanggal 2 Juli 2023.
- Boekaerts, M., Zeidner, M., & Pintrich, P. R. (1999). *Handbook of self-regulation*. Elsevier.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. 2019. Sistem ketatanegaraan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.
- Haba, J. 2012. Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik Di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat&Budaya* 14, 31–52.



- Hamdan dalam Rihuh, 2003. Di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Departemen Agama RI bekerjasama dengan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta: DEPAG RI,
- Hadi, Syamsul, 2005. Abdur Rahman Wahid: Pemikiran tentang Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia, Tesis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,
- Ismail, S. M. and Hidayatulloh, A. 2014. *Learning to Live Together*. Al-Ulum 14, 229–246.
- Jati, W. R. 2013. Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, 393–416.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nurkholis. 2013. Pendidikan dalam memajukan teknologi. *Jurnal kependidikan*. Vol 1. (1): 26.
- Rifai, Afif, 2003. dalam *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, DEPAG RI Bekerjasama dengan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta
- Sawaludin, 2016. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pembinaan Nasionalisme pada Masyarakat Multikultural. *JIME* 2, 68–74.
- Siwananda, Sri Swami. 2003. *Intisari Ajaran Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Suyitno, I, 2012. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, 1–13.
- Syamsul Ma'arif, 2010. Pendidikan Pluralisme di Indonesia, loc. Cit
- Syamsul Ma'arif, 2008. *The Beauty of Islam dalam Cinta dan Pendidikan Pluralisme*, (Semarang: Nedd's Press.), hlm. 100
- Tahar, I., & Enceng, E. (2006). Hubungan kemandirian belajar dan hasil belajar pada pendidikan jarak jauh. *Jurnal Pendidikan Dan Jarak Jauh*, 7(2), 91–101.
- Winarno, 2020. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zakiah, 2017. Cendekiawan Muslim dan Wacana Konflik Etnis Di Kalimantan Barat Panangkaran. *Penangkaran Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, 191–213. *Jurnal Penelitian Agama*.
- Zein, Muh, 2016. Peran Guru Dalam Pengembangan Pembelajaran. *Journal UIN Alauddin*. Vol 2. (2): 279.